

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan rancangan perencanaan pembangunan Pariwisata di Provinsi Bali dalam satu tahun. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

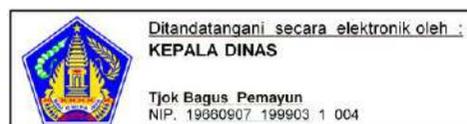
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai unsur di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dapat menjadi acuan resmi dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 masih belum sempurna, karenanya masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan sinar suci-Nya dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata di Bali

Bali, 11 Juli 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

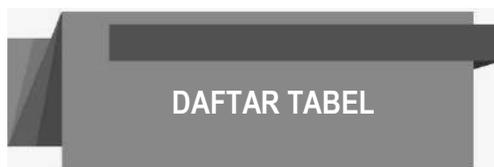
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA	
PROVINSI BALI TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali.....	24
2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.....	27
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA.....	30
BAB V PENUTUP	31





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.2. Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.3. Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural.....	12
Tabel 2.4. Aset pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali	12
Tabel 2.5. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2021	13
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021	24
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023	26
Tabel 3.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023.....	28



A graphic consisting of a dark grey rectangular box with a white border, containing the text "DAFTAR LAMPIRAN" in white capital letters. The box is slightly offset to the right and has a subtle shadow effect.

Lampiran 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Provinsi Bali.....	33
Lampiran 3.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	38



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pariwisata Bali berdasarkan kearifan lokal budaya Bali tidak bisa dilepaskan dari keinginan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor Pariwisata. Kearifan lokal budaya Bali sebagai daya dukung Pariwisata mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna mendukung Pariwisata. Sebagaimana diamanatkan aturan perundangan, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money follow function* diubah menjadi *Money follow program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial.

Perencanaan Pariwisata mengacu pada *Money follow program* maksudnya; walaupun program dan kegiatan dimaksud merupakan tugas pokok dan fungsi, namun kalau bukan merupakan program prioritas, maka tugas pokok dan fungsi tersebut belum tentu terdani. Pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial maksudnya dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) setiap perangkat daerah hendaknya menyeluruh, terpadu, dengan tema tertentu dan berdasarkan kewilayahan.

Arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu: pengembangan desa wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, pariwisata yang memberdayakan sumber daya lokal seperti tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal.

Tema pariwisata dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sangat mendukung upaya Provinsi Bali dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pariwisata Provinsi Bali diharapkan memiliki peran dan kontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata. Terkait dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa



aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Isu utama pembangunan Bali saat ini adalah mengarahkan kebijakan pembangunan Bali yang dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi Bali pasca Pandemi Covid-19.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Pariwisata. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali telah merancang program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
 - 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
 - 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - b. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
 - 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - a. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan



- b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- c. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3565 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; selanjutnya. Orientasi mengenai Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali; dilanjutkan pada proses di Sekretariat Daerah. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Bali dilakukan melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 16 Februari 2022 di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali secara daring dengan mengundang Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Bali, Asosiasi Pariwisata, dan *stake holder* pariwisata Bali. Pada Forum Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Bali memaparkan Rencana Kerja Tahun 2023 sehingga para peserta forum dapat mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan dapat memberi masukan dan saran sehingga rencana tersebut lebih optimal.

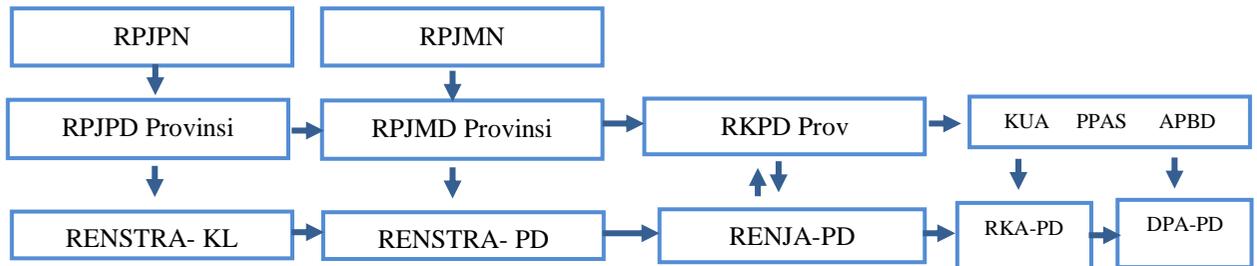
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Diagram 1.1 dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, selanjutnya akan menjadi acuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)



- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;



- 26) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
- 29) Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
- 30) Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
- 31) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah wajib sinkron dengan Rencana Kerja Permerintah Daerah (RKPD), maka maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 adalah menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2023 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 dan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 akan disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2023.



- 2) Merancang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023.
- 3) Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 4) Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023

Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Rencana Kerja (Renja), hubungan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD), dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Pada Bab III Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan 3) Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Bab IV. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain :Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI TAHUN LALU

Pada BAB II diuraikan mengenai Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu antara lain: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Tahun 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Pariwisata. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Urusan Pariwisata merupakan Urusan Pilihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pariwisata;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan data tahun 2022, komposisi kepegawaian Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



Tabel.2.1
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	22
2	Strata 1	24
3	Diploma III	4
4	SLTA / Sederajat	11
5	SLTP / Sederajat	1
Total		62

Tabel.2.2
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	14
2	Golongan III	39
3	Golongan II	9
Total		62

Tabel.2.3
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Sub Koordinator	12
Total		19

Tabel.2.4
Aset Pada Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	5.270 M ²
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	12 Unit
3	Mobil Minibus	9
4	Truk	-
5	Sepeda Motor	5
6	Speed Boat	-
7	Perahu Ketek	-
8	Sepeda motor R3	-
9	Eskavator	-
10	Barang lainnya (Buah/Unit)	266 Unit

Pada tahun 2021 Dinas Pariwisata dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Pariwisata melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 sebagai hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun ketiga akan diuraikan secara detail berikut ini:



Tabel 2.5
Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.425.810.907	11.501.608.807	92,56	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83	82,02	99,04
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.711.704	117.652.731	98,28	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.888.698	40.220.385	98,37	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	4	4	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	546.300	398.700	72,98	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	1	1	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	402.700	269.500	66,92	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	Dokumen	1	1	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	442.700	301.000	67,99	Jumlah DPA yang disusun	Dokumen	1	1	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	442.700	301.000	67,99	Jumlah perubahan DPA yang disusun	Dokumen	1	1	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.164.958	38.416.398	98,09	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Dokumen	15	15	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.823.648	37.745.748	99,79	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	100
b	Administrasi Keuangan	10.767.696.764	9.964.654.604	92,54	Jumlah dokumen	Dokumen	534	534	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah				administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.767.696.764	9.964.654.604	92,54	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	Dokumen	86	86	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.580.835	127.480.901	85,80	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jenis	6	6	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.654.221	93,08	Jumlah komponen listrik dan baterai yang disediakan	Jenis	6	6	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.938.835	17.295.665	91,32	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	Jenis	31	31	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.840.000	50.351.600	97,36	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	Jenis	4	4	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.006.000	7.708.290	85,59	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	10	10	100
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.680.000	6.992.000	65,47	Jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis	1	1	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.116.000	40.479.125	82,42	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jenis	2	2	100
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.278.340	355.009.452	90,73	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	3	3	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang Disediakan				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	Jenis	1	1	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.800.000	142.854.972	79,90	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	Jenis	4	4	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.478.340	209.154.480	99,85	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	Jenis	5	5	100
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	998.543.264	936.811.119	93,82	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jenis	3	3	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.657.200	220.657.300	89,46	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	Jenis	4	4	100
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	674.576.064	640.139.320	94,90	Terlaksananya urusan pemerintah	Jenis	3	3	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.310.000	76.014.499	98,32	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jenis	3	3	100
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	121.360.569	120.272.339	99,10	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Persen	2,56	2,56	100
A	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	121.360.569	120.272.339	99,10	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	DTW	13	13	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	121.360.569	120.272.339	99,10	-Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan - Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi -Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif -Jumlah peningkatan desa wisata berbasis budaya	-DTW Alam -DTW Buatan -DTW Budaya -Desa Wisata	-8 -5 - 0 -0	-8 -5 -0 -0	100
III	Program Pemasaran Pariwisata	229.927.053	229.042.288	99,61	Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	-29,16	-28,79	100
a	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	229.927.053	229.042.288	99,61	Jumlah Masyarakat Yang Mengakses Informasi Pariwisata	Orang	2.209.400	3.500.000	158
1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	37.476.448	37.476.448	100,00	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	Tayangan	150	341	227
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	37.476.448	37.476.448	100,00	Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Event dalam negeri	1	0	0
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	78.111.551	77.356.496	99,03	Jumlah informasi kepariwisataan yang	Dokumen	1	1	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)					
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja			
							Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				tersampaikan melalui media teknologi					
4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	76.862.606	76.732.896	99,83	Jumlah sarana promosi wisata digital	Video	1	1	100	
IV	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	194.634.325	190.523.506	97,89	Persentase Pengajuan Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	1	0	0	
A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	155.290.777	151.414.468	97,50	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Sarana dan Prasaraja	9	9	100	
1	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	1.670.715	1.504.410	90,05	Jumlah pameran produk kreatif	Pameran	1	0	0	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	76.967.946	76.520.056	99,42	-Jumlah jaringan orang kreatif -Jumlah ruang kreasi	-Jaringan -Ruang Kreasi	-9 -9	-8 -6	77,78	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	76.652.116	73.390.002	95,74	-Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun - Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula	-Buku -Usaha	-100 -18	-0 -18	50	
b	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreati	39.343.548	39.109.038	99,40	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Ekosistem	9	0	0	
1	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	39.343.548	39.109.038	99,40	Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	Dokumen	1	0	0	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.285.154.044	1.170.342.848	91,07	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi	Persen	43	75	100
a	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.285.154.044	1.170.342.848	91,07	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikat pelatihan	Orang	375	375	100
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	244.786.294	227.849.739	93,08	- Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan -Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisas	-Orang -Orang	-0 -40	-0 -40	100
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	510.052.750	442.384.003	86,66	-Jumlah Kelompok Sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan -Jumlah Pengelola Desa Wisata yang mendapatkan pelatihan -Jumlah Pengelolaan Kuliner yang mendapatkan pelatihan -Jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan	-Kelompok -Orang -Orang -Orang -Orang	-2 -40 -40 -40 -20	-2 -40 -40 -40 -20	100



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)					
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja			
							Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					-Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikasi kompetensi pariwisata					
3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	370.183.400	342.955.860	92,64	Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan	Orang	120	120	100	
4	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	159.702.406	157.153.246	98,40	-Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan -Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata	-Orang -Orang	-30 -45	-30 -45	100	
		14.256.886.898	13.211.789.788	92,67						
	JUMLAH PROGRAM :	5								
	JUMLAH KEGIATAN :	10								
	JUMLAH SUB KEGIATAN :	33								



Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Pariwisata tahun 2021 adalah;

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 33 sub kegiatan, Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

A. Program Pemasaran Pariwisata

- a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

B. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - 1. Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
 - 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
- b) Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari 5 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- a) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 1. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi



- C. Program Pemasaran Pariwisata
 - a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - a) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
- E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - b) Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
 - 2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - 3. Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
 - 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

- A. Program Pemasaran Pariwisata
 - a) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- B. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



d. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu :

- a) Yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan yaitu pandemi covid – 19 yang menyebabkan anggaran difocusing, sehingga menyebabkan tidak tercapai target kinerja yang direncanakan.
- b) Yang menyebabkan capaian kinerja melebihi target yaitu karena adanya anggaran yang bersumber dari DAK sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan rasionalisasi anggaran sehingga berpengaruh terhadap realisasi kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan khusus yang perlu diambil terkait tidak terealisasinya kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang disebabkan adanya rasionalisasi anggaran karena pandemi covid-19 maka akan ditindak lanjuti kembali pada RKPD pada tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tergolong baik, secara umum Realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.211.789.788,- atau 92,67% dari target Rp. 14.256.886.898,-.

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Norma Standar Prosedur Kegiatan (NSPK) telah dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.6. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2021

No	Indikator	SPM/ Stnadar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi 2022	Catata n Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	-	3,50 Hari Wisman dan 2,30 Hari Wisnus	-	-	2,56%	3,85%	-	-	2,56%	3,85%	
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	-		-	-	13 DTW	72 DTW	-	-	13 DTW	72 DTW	
II	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	-	3,50 Hari Wisman dan 2,30 Hari Wisnus	-	-	-	1%	-	-	-	1%	
1	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	-		-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	
2	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan			-	-	-	3 Usaha Pariwisata	-	-	-	3 Usaha Pariwisata	
III	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	-	0 Orang Wisman dan 4.000.000 Orang Wisnus	-	-	-29,16%	37,50%	6,27 %	- 66,43%	-28,79%	37,50%	
1	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	-		-	-	2.209.400 Orang	2.754.700 Orang	-	5.263.617 Orang	3.500.000 Orang	2.754.700 Orang	
IV	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	145 USD dan Rp. 500.000	-	-	1 Usaha	3 Usaha	-	-	-	3 Usaha	
1	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	-		-	-	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	-	-	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	
2	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	-		-	-	9 Ekosistem	9 Ekosistem	-	-	-	9 Ekosistem	
V	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat	-	3,50 Hari Wisman dan 2,30 Hari Wisnus	-	-	43%	44%	-	-	75%	44%	
1	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	-		-	-	375 Orang	130 Orang	-	-	375 Orang	130 Orang	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu Yang Berkembang Pada Tahun 2021 Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Bali Adalah Sebagai Berikut :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Destinasi Pariwisata Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Memiliki Kualifikasi Sesuai dengan Bidangnya
3. Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata
4. Belum Optimalnya Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
5. Adanya Ketimpangan Pembangunan Kepariwisata (Bali Utara dan Bali Selatan)
6. Pandemi Covid-19

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali baru diedarkan pada minggu pertama Bulan Juli 2022, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata baru dilakukan pada minggu pertama Bulan Juli 2022. Untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dilakukan Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2021 dan kebutuhan tahun 2023. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2023, tidak perlu mengusulkan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau program, kegiatan, dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Perangkat Daerah ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dan Bappeda Kabupaten/Kota maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :



1. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan;
2. Oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) menjadi daftar pendek

Tabel 2.7
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menyusun Tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya pada Pada Bab III Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang disusun adalah kebijakan Pariwisata pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah Kebijakan Pariwisata pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) secara ringkas adalah: Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Pariwisata serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Pariwisata Provinsi Bali adalah:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Pengembangan SDM Pariwisata
- c. Peningkatan Pemasaran Pariwisata
- d. Pengembangan Standar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2018-2023 di tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata maka, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra).

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas dengan indikator Meningkatkan Rata-rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara.



2. Meningkatnya pasar pariwisata Bali dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan dengan indikator Indeks kepuasan wisatawan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan lima sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas.
- b. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- c. Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global.
- d. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan.
- e. Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata.

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pariwisata berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
II	Program Peningkata Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah



	Provinsi
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
III	Program Pemasaran Pariwisata
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
IV	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Riang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
V	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	JUMLAH PROGRAM : 5
	JUMLAH KEGIATAN : 12
	JUMLAH SUB KEGIATAN : 28



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

Pada Bab IV diuraikan mengenai Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Pariwisata yang mengacu pada Renstra terlampir pada lampiran 2.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB V

PENUTUP

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak Sesuai

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata yang berlaku 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apabila di dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tersebut terjadi keterbatasan dana atau efisiensi anggaran, maka target Rencana Kerja (Renja) disesuaikan. Tindak lanjut alokasi anggaran atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.

2) Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, sudah disesuaikan dengan landasan dan dasar hukum yang berlaku. Substansi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata.

3) Rencana Tindak Lanjut

Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan kegiatan kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali, telah menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) untuk urusan pariwisata dapat tercapai. Jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan keterbatasan anggaran ataupun permasalahan teknis lainnya, maka dilakukan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023. Terima kasih



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3		Urusan Pilihan												
3	02	Pariwisata												
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	82,02	83	82,02	98,82	82	82,02	98,82.		
3	26	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74 Dokumen	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100	22 Dokumen	46 Dokumen	62,16	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	28 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6 Dokumen	10 Dokumen	35,71
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi yang disusun	48 Dokumen	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100	16 Dokumen	31 Dokumen	64,58
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Ketentuan	1.602 Dokumen	-	534 Dokumen	534 Dokumen	100	534 Dokumen	1.068 Dokumen	66,67
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	172 Dokumen	-	86 Dokumen	86 Dokumen	100	86 Dokumen	172 Dokumen	100
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18 Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	12 Dokumen	66,67



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Baterai yang disediakan	12 Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100	5 Jenis	12 Jenis	100
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat-alat Kantor yang disediakan	59 Jenis	-	31 Jenis	31 Jenis	100	28 Jenis	59 Jenis	100
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan	8 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	8 Jenis	100
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Jenis	-	10 Jenis	10 Jenis	100	6 Jenis	16 Jenis	100
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	2 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100	1 jenis	2 Jenis	100
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	4 Jenis	100
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	9 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	66,67
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Material dan Benda Pos untuk Kelancaran Administrasi	2 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	100
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Biaya Langganan Telepon, Air, dan Listrik	7 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	3 Jenis	7 Jenis	100
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Penataan Taman Kantor	7 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100	2 Jenis	7 Jenis	100
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	66,67
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Transportasi yang Dipelihara	8 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	8 Jenis	100
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah	6 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	100
3	26	01	1.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Peralatan Kantor	6 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	100



3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%	-	-29,16%	-28,79%	100	37,50%	37,50%	82,51
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	13.527.717 Orang	-	2.209.400 Orang	3.500.000 Orang	158	2.754.700 Orang	6.254.700 Orang	46,24
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi, Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	9.341 Tayangan	-	150 Tayangan	341 Tayangan	227	9.000 Tayangan	9.341 Tayangan	100
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	4 Dokumen	80
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	9 Video Promosi	-	1 Video	1 Video Promosi	100	4 Video Promosi	5 Video Promosi	55,55
3	26	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengajuan usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	9%	-	1%	0%	0	3%	3%	33,33
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	27 Sarana dan Prasarana	-	9 Sarana dan Prasarana	9 Sarana dan Prasarana	100	9 Sarana dan Prasarana	18 Sarana dan Prasarana	66,67
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Usaha Kreatif terutama bagi usaha pemula yang mendapatkan pembinaan	108 Usaha Pariwisata	-	18 Usaha	18 Usaha	100	90 Usaha Pariwisata	108 Usaha Pariwisata	100
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	27 Ekosistem	-	9 Ekosistem	0 Ekosistem	0	9 Ekosistem	9 Ekosistem	33,33
3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	3 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Ekosistem	0	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat	45%	-	43%	75%	100	44%	44%	97,77



					Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	415 Orang	-	375 Orang	375 Orang	100	130 Orang	505 Orang	121
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan	96 Orang	-	70 Orang	70 Orang	100	26 Orang	96 Orang	100
						Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	242 Orang	-	65 Orang	65 Orang	100	177 Orang	242 Orang	100



Lampiran 2.

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	2,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	3 Laporan	100 Persen	65,397,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							373,332,000			
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	2,332,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	36 Laporan	100 Persen	116,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	83 Nilai	8 Laporan	100 Persen	255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah							1,096,780,012			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan yang digunakan Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Denpasar, Denpasar					PENDAPATAN	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Jumlah Kendaraan yang digunakan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Kota Denpasar, Denpasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	26	02					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				493,243,984					
3	26	02	1.01				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				41,138,200					
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung,	5.13 Persen	9 Dokumen	40 DTW	41,138,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					339,199,888					
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya pedoman jalur wisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua	1 PERSN	1 Dokumen	1 Dokumen	339,199,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Persentase produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Persen	3 Unit Usaha	5 Usaha Pariwisata	15,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah dokumen hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.45 Persen	1 Dokumen	20 Persen	145,662,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.45 Persen	1 Dokumen	20 Persen	93,735,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.45 Persen	1 Dokumen	20 Persen	196,652,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	18 Laporan	9 Sarana dan Prasarana	30,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kuta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sempura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	50 Laporan	9 Sarana dan Prasarana	65,028,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	35 Orang	44 Persen	172,529,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	44 Orang	44 Persen	135,481,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	50 Orang	44 Persen	175,343,744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor3);

11. Peraturan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan Pelaksanaan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023;
- b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal : 17 Januari 2022
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Bali,



Tjok Bagus Pemayun, A.Par., MM.
NIP. 19660907 199903 1 004

LAMPIRAN...



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
NOMOR : B.20.188.4/446/SEKRET/DISPAR
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI
TAHUN 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023;

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Unit Substansi Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
2. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM
3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
4. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi
7. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
8. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
9. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan Kelembagaan
10. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan SDM Pariwisata
11. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan SDM Ekraf
12. Sub Koordinator Unit Substansi Promosi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

13. Sub Koordinator Unit Substansi Pengembangan Pasar
14. Sub Koordinator Unit Substansi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital
15. Sub Koordinator Unit Substansi Usaha Pariwisata
16. Sub Koordinator Unit Substansi Standard dan Sertifikasi Usaha
17. Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif
18. Seluruh Staf pada Unit Substansi Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Bali,



Tjok Bagus Pemayun, A.Par., MM.
NIP. 19660907 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE